

Faksionalisasi ORMAS Pemuda Pancasila Dalam Tim Sukses Prabowo-Hatta Di PILPRES tahun 2014

Eka Kurniasari Afandi
Email: ekakurniasaria@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang multikultural dan demokrasi. Demokrasi memiliki dua dimensi yaitu persaingan dan partisipasi yang bermakna bahwa setiap individu dan partai politik sebagai peserta pemilu harus berjuang melalui kompetisi yang kompetitif untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum. Karakteristik kompetisi yang vis-à-vis menyebabkan peserta pemilihan umum melakukan konsolidasi dengan organisasi masyarakat sipil sebagai strategi politik. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil untuk memobilisasi massa yang dimiliki dipercaya peserta pemilihan umum mampu meloloskan mereka untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan. Munculnya faksi dalam organisasi masyarakat merupakan suatu hal yang biasa, dimana antar anggota merasa tidak ada kesamaan dan perbedaan, rentan memunculkan pembentukan faksi dalam partai politik. Pemuda Pancasila Kota Surabaya merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang mengikuti Pilpres dan terjadi Faksionalisasi didalamnya dan mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden tahun 2014. Studi Organisasi Pemuda Pancasila Cabang Kota Surabaya ini memberikan pemaparan dan penjelasan bagaimana faksionalisasi dapat terjadi MPC Pemuda Pancasila Cabang Surabaya, penyebab karena berasal dari eksternal yaitu dengan keikutsertaan kader sebagai anggota partai politik Pilpres 2014.

Kata kunci : Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Faksionalisasi

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah seperangkat nilai yang berasal dari Barat yang menghasilkan sistem politik yang telah dipraktikkan di sejumlah negara. Demokrasi dinilai sebagai suatu tipe ideal sebuah sistem politik. Menurut Schumpeter dalam karya besarnya *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Demokrasi adalah sebuah sistem persaingan yang terbuka dan *fair* di kalangan elite politik untuk mendapatkan kekuasaan. Rakyat merupakan hakim terakhir yang memutuskan siapa yang akan memerintah mereka. Dengan demikian, para elite yang bersaing tersebut memainkan permainan politik, pola hubungan diantara keduanya diteguhkan melalui mekanisme pemilu yang jujur dan terbuka.¹

Sebagai arena kontestasi untuk memilih kepala negara yang calonnya hanya beberapa pasang atau hanya dua pasang dan terbatas. Pasangan yang mencalonkan sebagai presiden dan

¹"*Dari langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan*", <http://books.google.co.id/books?isbn=9799101425> (akses 13 Februari 2016).

wakil presiden dapat berasal dari beberapa partai yang disebut koalisi atau juga dapat mengajukan independen tanpa melalui partai. Salah satu yang dilakukan adalah serangkaian agenda politik dengan melakukan konsolidasi berbagai kekuatan politik untuk memobilisasi massa agar memberikan dukungan karena karakteristik didalam kontestasi politik menyebabkan kompetisi menjadi *vis-à-vis* yaitu pada pihak yang menang dan mendapatkan kekuasaan serta terdapat pihak yang alah merasa ada diluar kekuasaan. Salah satu kekuatan politik yang keberadaannya sangat diperhitungkan oleh para peserta pemilihan umum untuk meraup suara adalah Organisasi Masyarakat Sipil. Kekuatan organisasi masyarakat sipil ini terletak pada jumlah massa yang riil hingga tingkat akar rumput. Maka tidak mengherankan apabila kemudian peserta pemilu menggunakan strategi untuk mendekati organisasi masyarakat sipil dengan menjalin deal-deal politik. Hal ini yang akhirnya menyeret keterlibatan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung calon tertentu dalam pemilihan umum agar memobilisasi dan mengamankan suara dari massa yang dimiliki organisasinya.

Padahal seyogyanya, organisasi masyarakat sipil/*civil society* sebagai salah satu pilar demokrasi sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad AS Hikam harusnya memiliki kemandirian (*autonomy*) tinggi yang ketika berhadapan dengan negara serta bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*) dan keswadayaan (*self-supporting*), serta keterikatan dengan norma-norma atau nilai hukum yang dipatuhi oleh warganya.² Sering disebut terlibat perkelahian antar Organisasi Massa (Ormas), Pemuda Pancasila (PP) mengatakan tengah berusaha untuk merubah citra agar tidak lagi dipandang sebagai Ormas preman. Pemuda Pancasila juga mengakui tidak pernah terlibat bentrok dengan Ormas lain. Organisasi Pemuda Pancasila sering disebut organisasi preman karena, rata – rata yang menjadi anggota adalah mereka yang mantan preman diangkat sebagai anggota ketika mereka terlibat dalam masalah dan sampai masuk bui lalu dibantu oleh organisasi untuk dapat bankit kembali. Tetapi sebenarnya tetap saja dalam organisasi Pemuda Pancasila terdapat elit organisasi, ketika salah satu elit organisasi mendapatkan permasalahan maka mereka yang menjadi anggota Pemuda Pancasila terutama yang berada dibawah naungan organisasi akan rela mati demi elit organisasi karena, mereka menganggap diangkat status nya oleh organisasi. Dapat dilihat pada saat salah satu Ketua Organisasi MPW Jawa Timur Lanyala Matalliti terlibat kasus korupsi para anggota Pemuda Pancasila mendatangi Kejaksaan Agung Surabaya untuk melakukan demonstrasi agar melepas cabutan pelaporan dan tidak itu saja para anggota juga menyergap rumah Ketua Jaksa Agung untuk melakukan pengancaman. Maka dari itu Pemuda Pancasila kerap terdengar sebagai Organisasi Preman.

Pemuda Pancasila Cabang Kota Surabaya salah satu organisasi masyarakat yang mempunyai anggota cukup banyak dan terdiri dari beberapa golongan mudah yang ada di Surabaya, merupakan organisasi yang banyak diantara anggotanya memiliki kedekatan dengan partai politik baik itu partai nasional atau partai islam. Bahkan dalam kedekatan tersebut tidak jarang membuat partai – partai atau kandidat kepala daerah menjadikan ormas sebagai mesin politik. Misalnya pada pemilihan presiden periode 2014 – 2019 Pemuda Pancasila memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo – Hatta tetapi tidak sedikit pula anggotanya mendukung pasangan lainnya.

²Muslim Mufti, *Kekuatan Politik di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 224.

Sebagai Organisasi Masyarakat yang seharusnya independen dan netral, tidak menjadikannya terlepas sama sekali dalam dinamika konstestasi politik nasional. Hal ini karena dengan jumlah massa yang tidak sedikit mengakibatkan organisasi masyarakat ini berada pada posisi tawar menawar yang tinggi dan diperebutkan karena memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan suara dari massa yang dimiliki untuk meloloskan peserta pemilu mendapatkan kekuasaan didalam pemerintahan.

KERANGKA TEORITIK

Faksionalisasi adalah pengelompokan yang biasanya terjadi antara anggota lembaga perwakilan, namun belum terbentuk sebagai organisasi resmi. Pada fase ini partisipasi maupun kelembagaan politik masih rendah. Individu – individu dan kelompok – kelompok politik masih memiliki perilaku politik tradisional yang belum terorganisasi secara modern. Kehidupan politik hanya melibatkan sedikit orang yang bersaing satu sama lain dalam kelompok yang tidak terstruktur sehingga daya tahannya kecil dan merupakan wahana penonjolan pribadi – pribadi tertentu. Semua aliansi atau kaukus yang terbentuk dapat saja disebut partai tapi tidak mempunyai dukungan sosial dan organisasional yang berkesinambungan.

Masalah klasik yang sering kali terdapat di dalam tubuh partai atau organisasi kemasyarakatan adalah adanya faksionalisasi. Faksionalisasi merupakan sebuah keniscayaan dalam tubuh partai politik terlebih pada partai yang awal terbentuknya berasal dari gabungan beragam kelompok. Faksionalisasi kepartaian sejatinya merupakan hal yang wajar terjadi. Faksionalisasi menjadi masalah serius ketika demokrasi internal tidak berjalan sehingga menghambat upaya pelebagaan partai politik. Secara konseptual, Françoise Boucek dalam “Rethinking Factionalism” (2009) membedakan „tiga wajah“ faksionalisme, yaitu kooperatif, kompetitif, dan degeneratif.³ Pertama, faksionalisme kooperatif akan muncul jikalau ada kapasitas agregatif partai atau organisasi untuk memfasilitasi kerjasama antar berbagai kelompok di dalam faksi. Berbagai faksi atas dasar pengelompokan militansi ideologis, primordial, ketokohan, dan lain sebagainya dapat mendinamisasi partai jika ada kepemimpinan yang berorientasi pada *consensus-building*. Kedua, faksionalisme kompetitif akan tampak ketika perbedaan pendapat, konflik kepentingan, maupun perebutan jabatan-jabatan strategis di partai menghadirkan gaya politik sentrifugal dan fragmentasi yang semakin mengeraskan perkubuan di dalam partai. Jika tidak dikelola dengan baik, energi kompetisi faksional ini dapat mendestabilisasi partai dan membuat kebuntuan pembuatan keputusan di partai. Ketiga, faksionalisme degeneratif terjadi ketika muncul banyak faksi yang berorientasi pada kepentingan kelompoknya semata dan beroperasi sebagai kanal untuk penyaluran patronase. Privatisasi faksi dan insentif ini tentu mendorong konflik internal yang parah dan dapat menjerumuskan partai pada perpecahan. Kedekatan antara organisasi kolateral independen dan partai politik tentunya membawa organisasi kolateral turut secara langsung maupun tidak langsung dalam dinamika internal partai. Organisasi kolateral partai tentunya akan memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada salah satu faksi. Keberpihakan tersebut

³ Françoise Boucek. *Rethinking Factionalism* dalam *Jurnal Of ...* (New York: Palgrave Mac Millan, 2009), hlm.85

bisa saja dikarenakan kedekatan kebanyakan anggota organisasi sayap dengan elit partai dari sebuah faksi. Ketika kebanyakan anggota organisasi kolateral dekat dengan elit. faksi A maka mereka cenderung untuk mendukung faksi A dalam kebijakan internal partai. Hubungan organisasi kolateral dan partai politik biasanya mencapai titik intensitas tertinggi keharmonisannya ketika menjelang Pemilu legislatif atau pemilihan presiden dan sebagainya.

Dampak dari faksionalisme jelas menyebabkan semakin melemahnya konsolidasi organisasi⁴. Para elit parpol atau organisasi saling melemahkan dan tidak saling mendukung. Implikasi kegagalan mengelola faksionalisme ini, cenderung dalam berpindah ke organisasi lain atau membuat parpol atau organisasi baru sambil mencaci maki parpol atau organisasi yang pernah mereka hinggapi. Parpol atau organisasi gagal menjalankan fungsinya sebagai intermediasi politik akan berimbas terhadap institusi demokrasi (eksekutif – legislatif – yudikatif) dan perilaku elit politik (pejabat politik) yang rekrutmenya melibatkan parpol. Karena itu pproblem yang ada di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sejatinya sangat mungkin merupakan imbas dari parpol yang gagal. Jka parpol atau organisasi gagal, maka tentu saja upaya maksimalisasi pelayanan publik menjadi ilusi atau tak pernah terwujud.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang informatif melalui penggalian data secara *in-depth* (mendalam) untuk menghasilkan penelitian *thick descriptive*. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam yang tidak terstandarisasi, observasi partisipan, dan menganalisis data sekunder seperti dokumen resmi. Subjek penelitian baik dari informan struktur Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila Cabang Kota Surabaya, Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila JATIM, Ketua Kaderisasi, sekretaris MPW Pemuda Pancasila JATIM , anggota biasa, dan ketua di tingkat kecamatan) didapat melalui metode *snowball*. Sedangkan lokasi penelitian secara disengaja dipilih di Kota Surabaya dengan mempertimbangkan aktifnya kegiatan anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila.

Aktor Yang Berwenang Dalam Menentukan Dukungan

Setelah melakukan beberapa pertimbangan dan sesuai dengan keputusan ketua umum Pemuda Pancasila untuk mendukung Prabowo – Hatta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maka langsung dilaksanakan rapat yang utama dengan semua kader Pemuda Pancasila maka setiap pimpinan wilayah akan mengadakan rapat kecil dengan pengurus harian seperti Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Bendahara untuk membahas dan melakukan sosialisasi dengan kader lainnya.

Sedangkan di tingkat anak cabang ada Forum pribadi yang dibentuk oleh PAC fungsinya sama untuk menyampaikan informasi yang disampaikan oleh MPW bertujuan sebagai media komunikasi sekaligus konsolidasi dengan MPC kota tersebut. Forum yang dilaksanakan setiap seminggu sekali atau setiap diskusi biasanya dimanfaatkan oleh Ketua MPC untuk mensosialisasikan figur Prabowo – Hatta yang sebelumnya telah disepakati di

⁴ Bima Arya Sugianto, "Beyond Formal Politics: Party Factionalism and Leadership In Post – Authoritarian Indonesia" (Thesis tidak diterbitkan, Departement Of Political and Social Change research School Of Pacific and Asian Studies The Australian National University, 2006) 126

Rapat Internal atau diskusi tentang polemik politik yang sedang menjadi pembicaraan. Di dalam Forum Komunikasi ini biasanya dihadiri wakil wakil dari tiap anak cabang se-Surabaya, juga dihadiri perwakilan di tiap ranting yang mengirimkan perwakilannya 10 orang. Sama dengan kegiatan sebelumnya, para Pengurus Harian akan menyisipkan informasi-informasi terkait figur yang didukung. Tetapi walaupun para Pengurus Harian melakukan sosialisasi untuk memobilisasi dukungan suara dari anggota – anggotanya dan menghimbau untuk memilih figur Prabowo – Hatta sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah disepakati didalam Rapat Internal antara pengurus harian.

Setiap anggota dari Pemuda Pancasila masih diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Hal ini dikarenakan himbauan yang dilakukan oleh Pengurus Harian tidak bersifat memaksa tetapi setengah memaksa para anggota atau kader untuk memilih figur yang tmeming sesuai dengan pertimbangan para pengurus harian di Rapat internal dan dalam organisasi ini selalu satu komando. Dinamakan setengah memaksa karena Pemuda Pancasila Cabang Kota Surabaya bukanlah organisasi politik yang memiliki hak untuk mewajibkan setiap anggota dari organisasi Pemuda Pancasila figur yang disepakati. Sehingga setiap anggota Pemuda Pancasila Kota Surabaya sebagai warga negara juga diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan kehendaknya. Tetapi disisi lain, sebagai anggota dari sebuah organisasi mereka dihadapkan pada figur yang sesuai kepentingan organisasi. Jadi dalam hal ini Organisasi Pemuda Pancasila tidak memaksa tetapi memang dari atasan atau Ketua Umum tetapi secara konkrit yang dikatakan organisasi seharusnya memang satu suara agar tidak ada perpecahan didalamnya, begitupula dengan Organisasi Pemuda Pancasila. Tetapi jika ada perbedaan didalamnya terkadang dikarenakan oleh perbedaan pendapat atau anggota yang menjadi salah satu partai dan mereka diwajibkan untuk mengikuti kata Ketua Umum Partai maka kembali lagi kepada anggota, jika mengikuti kata Ketua Partai silahkan tidak ada yang dipermasalahkan selama masih dalam bentuk batas kewajaran dan tidak merugikan antar satu pihak.

Peta Faksionalisasi di Organisasi Pemuda Pancasila Surabaya dalam Mendukung Prabowo – Hatta

Bukan hanya partai politik saja yang rentan mengalami konflik, permasalahan, perpecahan, adanya fakso – faksi di internal partai dan yang lainnya. Fenomena tersebut juga terjadi di internal Pemuda Pancasila Surabaya. Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Orgnisasi Pemuda Pancasila sepakat mengusung Prabowo Subiano – Hatta Radjasa sesuai dengan intruksi Ketua Umum dan Ketua MPW Organisasi Pemuda Pancasila tetapi dalam pengusungan nama tersebut tidak diwarnai konflik yang terlihat seperti partai – partai politik karena biasanya mereka yang tidak sesuai dengan kata ketua langsung mundur atau tidak datang pada saat rapat atau kegiatan lain yang berhubungan dengan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden lebih memilih untuk diam agar tidak membuat konflik didalam Organisasi Pemuda Pancasila Surabaya .

Perpecahan bermula ketika Ketua Umum menyampaikan bahwa Pemuda Pancasila akan mengsung atau mendukung Prabowo – Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden tetapi perpecahan bukan berasal dari dalam internal organisasi melainkan eksternal organisasi. Di Organisasi Pemuda Pancasila terdapat 31 PAC (Pimpinan Anak Cabang) Surabaya yang mewakili kelurahan yang ada di Surabaya tepatnya setiap kecamatan, mulanya perbedaan

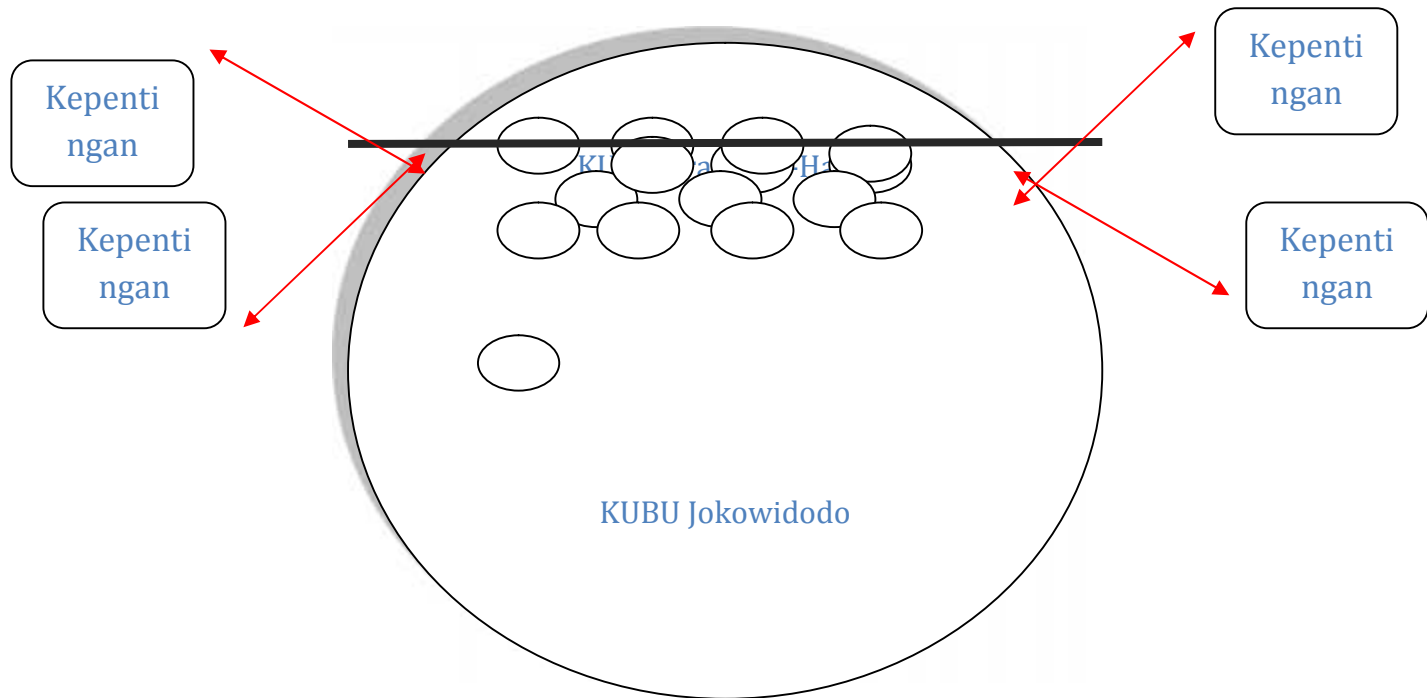
pendapat karena ada beberapa anggota Pemuda Pancasila yang ikut atau sebagai anggota Partai Politik yang tidak berkoalisi dengan KMP (Koalisi Merah Putih) walaupun dalam suatu organisasi setiap kader harus mengikut kata Ketua Umum tetapi untuk Organisasi Pemuda Pancasila bukan dibebaskan tetapi mereka diberi pilihan untuk mengikuti organisasi atau lebih memilih intruksi ketua partai. Dalam hal ini beberapa anggota lebih memilih intruksi Ketua Partai politik karena dianggap telah memberi banyak positif dengan mereka atau sesuai dengan visi dan misi. Karena adanya perbedaan pendapat biasanya mereka mengurangi jadwal pertemuan selama kampanye berlangsung gunanya agar tidak terjadi konflik hal seperti ini sangat mudah terjadi perbedaan pendapat dan akhirnya muncul konflik didalamnya

Menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014 – 2019, Organisasi Pemuda Pancasila mempersiapkan untuk mendukung Prabowo – Hatta yaitu dengan bergabung anak muda yang ada di Surabaya atau salah satu gerakan pemilih muda untuk mendukung Prabowo – Hatta yang diketuai oleh Andi Matalliti sebagai Ketua MPW SAPMA (Satuan Pemuda Mahasiswa) dan anak Lanyala Matalliti yang juga menjabat sebagai Ketua MPW Jawa Timur Pemuda Pancasila untuk menyampaikan visi dan misi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan pada bulan ramadhan tahun 2014 tempat di depan Kebun Binatang Surabaya akan tetapi pada saat terjadi pemaparan visi dan misi tidak dihadiri oleh semua anggota Pemuda Pancasila yang juga satu suara dengan Ketua Umum atau Ketua MPW dan yang tidak mendukung memilih untuk bermain dalam ranah yang berbeda agar perbedaan tidak menjadi konflik.

Sebagai sekertaris organisasi Pemuda Pancasila kewajibannya hanya menjalankan perintah sesuai dengan AD/ART dan mendukung apapun yang dilakukan oleh Ketua Umum termasuk untuk mengambil keputusan setuju memilih Prabowo – Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden tahun 2014, tetapi dalam hal perbedaan pendapat setiap anggota Pemuda Pancasila tidak berani untuk menceritakan atau memberi penjelasan secara gamblang alasannya karena itu bukan konsumsi publik dan tidak seharusnya orang umum mengetahui hal seperti itu pada hakikatnya semua organisasi selalu ingin terlihat kompak dan tidak ada konflik. Tapi semisal memang ada perbedaan pendapat antara anggota satu dengan yang lain tidak terlalu dipermasalahkan asal jelas alasan yang diberikan maka Ketua akan membebaskan.

Akan tetapi pernyataan berbeda diberikan oleh anggota Organisasi Pemuda Pancasila yaitu sebenarnya ada perpecahan didalamnya, dalam setiap Kota biasanya terdapat beberapa ranting dan jumlah anggota bukan lagi puluhan melainkan sampai ratusan dalam hal itu jika terdapat perbedaan pendapat maka tidak seberapa dihiraukan karena memang banyak anggota atau memang anggota tersebut jarang terlihat. Jadi jika terdapat rapat – rapat untuk membahas mengenai calon presiden dan wakil presiden memang anggota atau kader yang tidak mendukung tidak akan di undang didalam rapat bukan karena takut sebagai mata – mata melainkan untuk menjaga kondusif nya rapat agar dapat menghasilkan proses yang memuaskan. Tetapi antara anggota dan ketua PAC Surabaya yang berbeda pendapat akhirnya menimbulkan pertanyaan sebenarnya ada atau tidak ada faksionalisasi dalam organisasi. Dalam hal ini sebenarnya makin mempertegas bahwa didalam tubuh organisasi terdapat perbedaan pendapat atau faksionalisasi tetapi ditutupin agar tidak terlihat oleh masyarakat umum.

Skema Faksionalisasi Organisasi Pemuda Pancasila Kota Surabaya di PILPRES periode 2014 – 2019



Dalam skema itu menjelaskan bahwa terdapat dua kubu didalamnya yaitu yang mendukung Prabowo – Hatta dan Jokowi – Jusuf Kalla, yaitu didalamnya mereka yang mendukung Prabowo dapat digambarkan pada gambar lingkaran bagian atas. Mereka yang mendukung Prabowo mengikuti kata ketua umum sedangkan mereka yang mendukung Jokowi berada pada lingkaran dibawah dan berada pada naungan Edy Rumpoko yang juga menjadi anggota partai politik PDI pada saat itu yang mengusung Jokowi – Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil presiden. mereka yang tidak satu suara dengan ketua memilih untuk tidak pernah ikut rapat selama kampanye berlangsung. Alasan mereka tidak satu suara selain mengikuti kata ketua partai yaitu memiliki kepentingan pribadi, karena dengan alasan rata – rata anggota elit pemuda Pancasila sebagai pengusaha kontraktor dan jika calon yang mereka dukung menang maka akan mempermudah untuk mendapatkan proyek pemerintahan.

Upaya yang Dilakukan oleh Organisasi Pemuda Pancasila dalam Menyelesaikan Masalah

Permasalahan yang terjadi di MPC Organisasi Pemuda Pancasila Surabaya bukanlah sebuah permasalahan yang jarang terjadi melainkan hampir terjadi di sebuah organisasi atau partai. Karena permasalahan tersebut memicu terjadinya perpecahan suara di internal Organisasi Pemuda Pancasila. Untuk mengantisipasi agar perpecahan suara yang terjadi di internal organisasi segera dapat dikendalikan, dan keadaan kembali kondusif seperti semula. Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan adanya surat rekomendasi dari MPP Organisasi Pemuda Pancasila mengenai arah dukungan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Intervensi dari Organisasi Pemuda Pancasila

Surat rekomendasi dari Organisasi Pemuda Pancasila merupakan sebuah intervensi dalam penyelesaian perpecahan yang terjadi di internal MPC Organisasi Pemuda Pancasila Surabaya. MPN adalah Majelis Pimpinan Nasional, yang merupakan pusat kepemimpinan Organisasi Pemuda Pancasila di seluruh Indonesia. Ketua MPC Organisasi Pemuda Pancasila Surabaya Haris Purwoko, Munculnya surat rekomendasi atau arahan tentang perbedaan pendapat mengenai tim sukses dari Organisasi Pemuda Pancasila pusat didasari dengan keputusan organisasi untuk mendukung Prabowo – Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, MPW Organisasi Pemuda Pancasila yang diketuai oleh Lanyala Matalliti, mengadakan musyawarah untuk menentukan arah dukungan dari Organisasi Pemuda Pancasila.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan saudara Nurdin, beliau mengatakan bahwa kadernya tidak dapat meneruskan jika sesuatu tidak sesuai dengan kata hatinya. Karena Organisasi Pemuda tidak lagi memiliki kader untuk diusung dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selain bukan partai politik karena memang mereka sudah yakin untuk mengusung Prabowo – Hatta sebagai calon, maka MPW melakukan musyawarah dengan DPC dan PAC Organisasi Pemuda Pancasila. Dari hasil musyawarah dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, DPC Organisasi Pemuda Pancasila memberikan rekomendasi bagi seluruh kader yang ada di Surabaya untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa.

Intervensi dari MPW dan DPAC Organisasi Pemuda Pancasila Surabaya ini, dapat dikatakan merupakan suatu perintah bagi semua kader Organisasi Pemuda Pancasila di Surabaya. Dengan adanya intervensi dari pusat merupakan upaya penyelesaian yang baik, karena dengan demikian perpecahan suara yang sempat terjadi di internal DPC Organisasi Pemuda Pancasila Surabaya dapat terselesaikan.

Motif Organisasi Pemuda Pancasila Mendukung Prabowo – Hatta

Segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi ataupun partai politik merupakan suatu hubungan timbal balik tersendiri untuk masing - masing aktor yang berlaku. Tidak jarang sebuah organisasi atau partai politik selalu melihat sisi positif dan sisi negatif sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan untuk menentukan memberi dukungan kepada calon yang ada. Karena langkah yang diambil oleh suatu organisasi dalam memberikan dukungan, biasanya akan mempengaruhi terhadap nilai yang akan diberikan masyarakat ke organisasi tersebut.

Mengenai alasan mengapa Organisasi Pemuda Pancasila memutuskan untuk mendukung Prabowo dan Hatta adalah Koalisi Merah Putih (KMP). Organisasi Pemuda Pancasila dan SAPMA atau organisasi yang masih dalam satu tim pendukung. Sehingga telah menjadi kewajiban bagi Organisasi Pemuda Pancasila untuk memberikannya kepada pasangan Prabowo dan Hatta. Karena pasangan tersebut diusung oleh KMP dan Ketua Umum menyarankan untuk menjadi tim sukses serta dukungan yang diberikan merupakan dukungan tak bersyarat.

Sesuai mendapatkan rekomendasi dari pusat atau Ketua Umum, Nurdin sebagai wakil ketua Organisasi Pemuda Pancasila Cabang Surabaya secara langsung mendeklarasikan dukungan Organisasi Pemuda Pancasila Cabang Surabaya kepada Prabowo – Hatta. Bentuk dukungan yang diberikan adalah mendirikan posko – posko, mengawasi jika ada pelanggaran pada saat kampanye atau pemilihan berlangsung dan membagikan sembako tetapi kegiatan ini

memang kegiatan yang rutin dilakukan Organisasi Pemuda Pancasila. Beberapa titik yang didirikan posko terutama yang dekat dengan kantor Organisasi Pemuda Pancasila atau ranting – ranting. Dengan adanya posko pemenangan yang didirikan oleh Organisasi Pemuda Pancasila, tentunya Organisasi Pemuda Pancasila berharap akan berhasil memperoleh suara dukungan sebanyak mungkin untuk Prabowo Subianto – Hatta Radjasa.

KESIMPULAN

Setelah melihat pemaparan temuan data yang didapatkan selama penelitian lapangan dan analisis data sebagaimana yang telah penulis kemukakan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Faksionalisasi yang terjadi di tubuh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Cabang Surabaya terjadi dari eksternal yaitu luar organisasi, yaitu sebagian anggota yang mengikuti partai politik yang tidak masuk dalam KMP (Koalisi Merah Putih) mereka yang mengikuti partai politik yang berbeda akhirnya memilih untuk mengikuti kata ketua partai dibandingkan ketua umum organisasi atau ketua MPW dan MPC. Dengan alasan jika dipartai politik sifatnya lebih memaksa walaupun tidak ada paksaan secara tertulis sama halnya seperti di Pemuda Pancasila tapi jika itu telah menjadi keputusan anggota ketua dan BPH tidak dapat berbuat apapun asal tidak membawa nama organisasi dan harus melepas seragam organisasi. Bagi mereka yang tidak satu suara dengan organisasi maka secara tidak langsung hampir tidak mengikuti kegiatan yang ada didalam organisasi mulai dari rapat dll kecuali kegiatan bagi – bagi sembako karena itu kegiatan rutin MPC Pemuda Pancasila Cabang Surabaya setiap bulan ramadhan. Wujud dari faksionalisasi tersebut adalah dengan ada perpecahan suara dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila tepatnya pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Pada saat itu Pemuda Pancasila mendukung Prabowo – Hatta yang berkoalisi dengan KMP. Kuatnya dan solid Organisasi Pemuda Pancasila ternyata juga dapat terpecahnya suara di anggotanya. Dan tegangnya anggota Organisasi Pemuda Pancasila antara yang setuju dengan arahan Ketua Umum dan anggota lain yang punya suara berbeda, misal mereka yang tidak ikut arahan jarang diundang jika ada rapat atau kegiatan selama Pilpres berlangsung.

Sebenarnya perpecahan terjadi sejak lama yaitu berakar pada saat Pemuda Pancasila mulai membentuk Partai Patriot karena sebagian anggota yang menjadi anggota partai politik yang berbeda dengan ideologi Pemuda Pancasila serta ada yang menganggap belum saatnya Pemuda Pancasila mendirikan Partai Politik. Terbangunya Partai Patriot dikarenakan kekecewaan terhadap Partai Golkar yang mulai menyimpang dari visi dan misi partai serta Pemuda Pancasila. Dalam hal ini Pemuda Pancasila menegaskan bahwa bukan Partai Golkar yang membawa pengaruh terhadap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila justru sebaliknya Partai Golkar bisa sebesar sekarang karena ada campur tangan dari Organisasi Pemuda Pancasila. Implikasi dari perbedaan pendapat dan pecahnya suara ternyata sudah berurutan dari masalah Partai Patriot sudah mulai beda suara tetapi organisasi mampu mengendalikan perpecahan didalamnya. Tapi jika dilihat sekarang partai patriot tidak eksis karena, memang tujuan didirikan untuk membantu suara dari calon presiden dan wakil presiden pada saat itu serta menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Tetapi pecahnya suara didalam tubuh Organisasi Pemuda Pancasila pada saat Pilpres tahun 2014 mengakibatkan adanya fragmentasi politik anggota-anggota Pemuda Pancasila Cabang Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Duverger, Maurice. *Partai Politik dan Kelompok – Kelompok Penekan*. 1994. Tangerang: Bina Aksarain.
- Ornestein.Norman J. *Interest Group, Lobbying and Policymaking*. 1978. Wangshington DC. Conressional Quarterly Press.
- Duvarger, Maurice. *Sosiologi Politik*. 1998. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Muslim Mutfi. *Kekuatan Politik di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setua. 2013. Bandung. Pustaka Setia hal:224.
- Harrison, Lisa. *Metode Penelitian Politik*. 2007. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Kartawidjaja, Pipit R dan M.Faishal Aminuddin. *Demokrasi Elektoral Bagian I*. 2014. Surabaya. Sindikasi Indonesia hal 115
- Peneliti Puskapol UI dan Dosen Politik FISIP Universitas Indonesia. 2014.*Problem representasi politik di Indonesia sebagai justifikasi dan pintu masuk gerakan kiri progresif ke dalam ruang politik electoral*. Depok: Puskapol UI
- Jurnal/Thesis dan Skripsi
- Francoise Boucek. *Rethinking Factionalism* dalam Jurnal Of Fationalism partij(New York: Palgrave Mac Millan, 2009), hlm.85
- Ramadhani, Savira, “*Hubungan Politik Pemuda Pancasila Dan Partai Patriot studi kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 di Surabaya*” (skripsi Ilmu Politik FISIP UNAIR)
- Bima Arya Sugianto, “*Beyond Formal Politics: Party Factionalim and Leadership In Post – Authoritarian Indonesia*” (Thesis tidak diterbitkan, Departement Of Political and Social Change research School Of Pacific and Asian Studies The Australian National University, 2006) 126
- Internet
- Dari langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan*”, <http://books.google.co.id/books?isbn=9799101425> (akses 13 Februari 2016).
- <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/beritapemilu/14/06/09/n6v7fz-pemuda-pancasila-mamuju-dukung-prabowohatta> (hari Kamis tanggal 4 Juni 2015)
- <http://www.expostnews.com/umum/politik-dan-pemerintahan/item/854-kader-pp-surabaya-siap-mati-dukung-prabowo> akses hari Selasa 15 Maret 2016
- <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2014/06/12/285032/relawan-srikandi-pemuda-pancasila-dukung-prabowo-hatta> akses pada hari Selasa 15 Maret 2016
- <http://politik.news.viva.co.id/news/read/510096-dukung-capres--pemuda-pancasila-diminta-buka-seragam> akses pada Selasa 16 maret 2016
- <http://pemudapancasila04.blogspot.co.id/2009/01/selayang-pandang-pemuda-pancasila.html> akses pada Selasa 16 maret 2016
- <https://sapmappsolo.wordpress.com/sejarah-sapma/> hari Kamis 18 Februari 2016
- <http://kpujatim.go.id/wp-content/uploads/2016/03/LAPORAN-RISET-Kota-Surabaya.pdf> hari Selasa, 7 Juni 2016 pukul 12.00 WIB
- <http://profil.merdeka.com/indonesia/h/hatta-rajasa/> hari Jumat 1 Maret 2016
- <http://kpu-surabayakota.go.id/kpu-surabaya-tetapkan-jumlah-dps/> hari Jumat 1 Maret 2016